

DAFTAR BACAAN

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. L'école de Palo Alto, 2006.

Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Jurnal Hukum

Arrosyid, Ahmad Harun, dan Ahmad Hidayatullah Zaarkasyi. "Kekuasaan Presiden Dalam Pemberian Grasi Menurut Hukum Positif Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2018): 141. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i2.3022>.

Gerald Tokoh, Alezandro, Saryono Yohanes, dan Hernimus Ratu Udju. "Wewenang Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Warga Negara Asing." *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2024).

Ginting, Muhammad Arga. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2017): 188–199.

Herwin Sulistyowati. "Tinjauan Tentang Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum*, no. 302 (2011): 39–42.

Huda, Ni'matul. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum* 8, no. 18 (2001). <https://media.neliti.com/media/publications/81848-ID-hak-prerogatif-presiden-dalam-perspektif.pdf>.

Ismara, Yudhistira Cipta, dan Lagasakti Parwati Margaretha. "Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (2024): 133–148. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148>.

- Johansyah. "Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang* 16 (2018): 195–207.
- Jumadi. "Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 18. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11499>.
- Kosanke, Robert M., Ralph Adolph, dan Universitas Brawijaya. "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Sebagai Hak Prerogatif Presiden." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 6, no. 3 (2019): 1–23.
- Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (2021): 56–60. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.
- Putri, Denna Yunita Karunia. "Tinjauan Pengajuan Grasi Oleh Terpidana Mati Pasca Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Narkotika." *Jurnal Verstek* 6, no. 3 (2016): 1–23.
- Romaliani, Karina, Muhammad Arsad, Nasution Adi, Syahputra Sirait. "Check and Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 1 (2021): 1–10. <http://jurnal.iain-padangsidimpunan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3386>.
- Widiarto, Aan Eko. "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 23. <https://doi.org/10.31078/jk1612>.

Media Daring

- Azizah, Alifi, M.S. Fines Fatimah, dan M.H. Fines Fatimah. *Analisis Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terkait Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kekerasan Seksual Anak*, 2020. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195623/>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).